

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan spesies yang ditandai dengan matinya individu terakhir dari spesies tersebut. Kepunahan merupakan proses alamiah, tetapi laju kepunahan yang mencapai 1000-10.000 kali dari proses alaminya (IUCN *Red list*, 2015) cukup mengkhawatirkan. Lebih dari 77.300 spesies telah masuk dalam *Red List International Union for Conservation of Nature* (IUCN) tahun 2015. Kepunahan ini terjadi akibat degradasi habitat, *over exploitation*, polusi, penyakit dan perubahan iklim. Ancaman punahnya flora dan fauna ini meningkat seiring dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk di sebagian Afrika, dan Asia termasuk Indonesia (Does & Matter, n.d.).

Indonesia menduduki posisi ke 4 dari 20 negara yang potensial mengalami ancaman atas keanekaragaman hayati yang dimiliki, dimana terdapat 1126 spesies yang terancam punah (Darlington, 2010). Keberadaan flora dan fauna terancam akibat fragmentasi habitat, pemanfaatan berlebihan, perburuan dan perdagangan ilegal. Konversi hutan untuk perkebunan, tuntutan pembangunan, *illegal logging* dan kebakaran hutan menyebabkan hilang dan rusaknya habitat satwa. Kondisi ini diperburuk dengan adanya perburuan dan perdagangan ilegal untuk memenuhi permintaan pasar akan tumbuhan dan satwa sebagai peliharaan, konsumsi, obat-obatan dan lain sebagainya (Santosa A. (Ed) 2008).

Ancaman terhadap kepunahan keanekaragaman hayati Indonesia menggugah pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari, selaras, serasi dan seimbang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Diperlukan pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan atau yang lebih dikenal dengan konservasi. Fauzi A (2009) menyatakan kerusakan terhadap sumber daya alam dan

lingkungan dipicu oleh dua faktor yaitu pola konsumsi (*consumption pattern*) dan kegagalan kebijakan (*policy failure*).

Kebijakan konservasi di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kebijakan ini telah memperoleh dukungan kebijakan lain dalam pelaksanaannya, misalnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Keluarnya undang-undang ini dirasa penting karena kerusakan lingkungan makin menjadi, sehingga perlu dikeluarkan sebuah kebijakan yang tidak hanya mengharuskan pengelolaan lingkungan akan tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan (Purnaweni, 2014). Hal ini dapat diartikan bahwa konservasi dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik. Tabel 1. memperlihatkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Tabel 1. Peraturan tentang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam

Peraturan perundangan	Isi
UU No 32 Tahun 2004 jo UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut termasuk kegiatan konservasi.</li> <li>▪ Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagai kawasan konservasi</li> </ul>
UU No 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, termasuk didalamnya pengalokasian ruang untuk kawasan konservasi.
UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal (analisis mengenai dampak lingkungan hidup)</li> <li>▪ Yang termasuk kriteria kegiatan yang berdampak penting adalah proses yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam</li> </ul>

Peraturan perundangan yang ada merupakan upaya pemerintah dalam melakukan konservasi demi terjaganya kualitas lingkungan, karena lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap warga negara. Selain pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/ kota mempunyai kewajiban untuk melakukan konservasi.

Menurut publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015), Indonesia telah mengalokasikan sekitar 27 juta hektar lahan sebagai kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan ini dilakukan menurut Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2011 jo PP No 108 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan bagian dari kawasan suaka alam sedangkan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam. Meski demikian, dalam pelaksanaannya pengelolaan kawasan konservasi mengalami berbagai permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi dipicu oleh beberapa hal, yang pertama adalah masalah internal seperti status dan kondisi kawasan, belum selesainya proses penataan batas, dan pengelolaan kawasan itu sendiri seperti kesulitan mengidentifikasi prioritas permasalahan, kurangnya sumberdaya, ketidaktepatan dalam mengalokasikan sumber daya, serta belum diketahui sejauh mana pengelolaan yang dilakukan berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan. Permasalahan kedua lebih disebabkan dari kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan mencatat bahwa tahun 2010 terdapat 3.800 desa di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Kondisi eksternal berikutnya adalah pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar dan permintaan pasar terhadap komoditi tertentu. Konflik antara pemerintah dan masyarakat sekitar seringkali terjadi seperti konflik yang terkait dengan tata batas dan konflik yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati (Purwanti et al, 2013)

Kawasan konservasi yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau lebih dikenal sebagai kawasan konservasi laut pun tak luput dari permasalahan. Menurut Prabowo A (2004), permasalahan yang terdapat pada kawasan konservasi laut adalah sebagai berikut:

- 1) Degradasi ekosistem akibat pola pemanfaatan sumberdaya
- 2) Sistem pengawasan dan pengamanan yang kurang efektif
- 3) Kurangnya koordinasi dan kerjasama pihak terkait
- 4) Kurangnya pemahaman dan penerimaan masyarakat tentang sistem pengelolaan kawasan
- 5) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya yang ada
- 6) Penurunan hasil tangkapan ikan akibat pola perikanan tak terkendali
- 7) Penggunaan alat tangkap ikan tak ramah lingkungan
- 8) Kurangnya data yang akurat tentang potensi dan pemanfaatan sumberdaya
- 9) Penurunan kualitas perairan akibat rusaknya ekosisten mangrove, peningkatan kebutuhan lahan, pembuangan sampah dan pencemaran limbah.

Terdapat tujuh kawasan konservasi laut di Indonesia yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya dan kaya akan keanekaragaman hayati yaitu Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Wakatobi, Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Takabonerate, Taman Nasional Togian, Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Taman Nasional Karimunjawa. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kawasan konservasi laut membutuhkan kebijakan pengelolaan yang tepat, sumberdaya yang memadai dan dukungan para pihak agar konservasi berhasil dilakukan, termasuk Taman Nasional Karimunjawa.

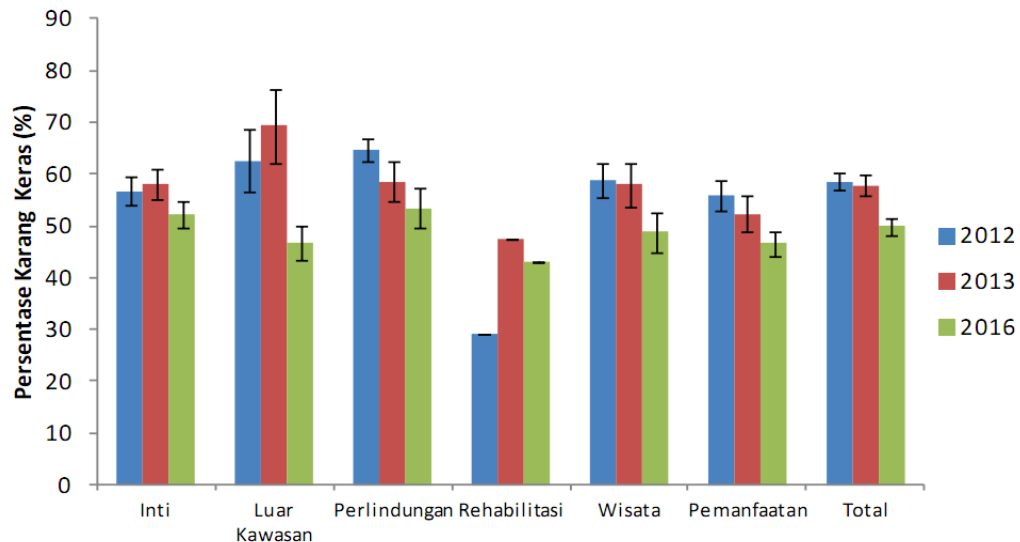
Taman Nasional Karimunjawa sebagai satu-satunya kawasan konservasi laut di Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai potensi. Lima ekosistem yang dimiliki yaitu ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, ekosistem hutan pantai, ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang memerlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaannya. Untuk melindungi potensinya, pada awalnya Kepulauan Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut pada tanggal 9 April 1986 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 123/Kpts-II/1986. Sehubungan dengan tingginya tingkat

kepentingan berbagai sektor maka dilakukan perubahan fungsi dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999. Kawasan ini merupakan gugusan 22 pulau dengan dua pulau terbesarnya yaitu Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, sedangkan 20 pulau lainnya merupakan pulau-pulau kecil.

Besarnya potensi yang dimiliki memberikan tantangan bagi Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ) sebagai pengelola untuk menjaga kawasan dari degradasi. Berbagai permasalahan penurunan sumber daya alam hayati terjadi dalam Taman Nasional Karimunjawa, seperti yang terjadi pada hutan mangrove. Dari hasil citra satelit ASTER perekaman tahun 2003, luasan hutan mangrove pada Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan adalah 184,89 Ha dan 222,9 Ha (Soebardjo, et al, 2006), dan setelah dilakukan penelitian pada tahun 2009 sampai 2012, luas hutan mangrove di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan mengalami degradasi seluas 23,8 Ha di daerah pesisir yang disebabkan gangguan secara alamiah dan perubahan tata guna lahan (Kamal et al, 2016). Deforestasi yang terjadi pada kawasan mangrove menyebabkan hilangnya fungsi ekologi dan manfaat secara ekonomi di Taman Nasional Karimunjawa (Daryono TM, 2011). Dalam unsur biotik lingkungan, deforestasi mangrove berdampak pada kelangsungan hidup berbagai biota seperti kepiting, burung, ikan, udang dan berbagai biota lain yang menjadikan hutan mangrove sebagai tempat hidup, tempat pemijahan dan tempat mencari makan. Dari unsur abiotik lingkungan, deforestasi mangrove berdampak pada semakin meningkatnya ancaman abrasi pantai dan berkurangnya penyerapan karbon. Menurut Rahman (2013), kerusakan hutan mangrove mempengaruhi aktifitas ekonomi penduduk, karena saat curah hujan tinggi daerah resapan berkurang sehingga dapat berakibat banjir dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu karena terpaksa tidak pergi bekerja.

Permasalahan selanjutnya setelah degradasi mangrove adalah penurunan tutupan karang keras pada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap gangguan. Secara alamiah, peningkatan suhu akibat perubahan iklim dapat menyebabkan pemutihan karang. Kerusakan

terumbu karang akibat ulah manusia bisa disebabkan oleh sandar jangkar kapal nelayan, wisata snorkeling dan aktifitas perikanan yang tidak ramah lingkungan. Laporan teknis dari *Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP, 2016)*, menunjukkan bahwa terjadi penurunan tutupan karang keras dari 57,86% di tahun 2013 menjadi 49,89% pada tahun 2016 di Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) seperti terlihat pada gambar 1. Dari gambar 1 diketahui bahwa dari survey yang dilakukan di tiga zona yang ada di Taman Nasional Karimunjawa tahun 2012, 2013 dan 2016 didapatkan bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2013 masih terdapat kenaikan prosentase tutupan karang keras pada zona inti, tetapi kondisi ini kemudian menurun di tahun 2016.



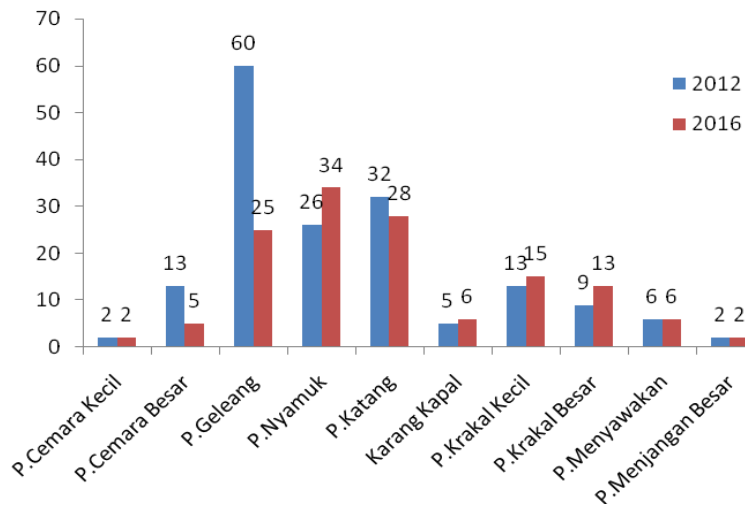
Gambar 1. Prosentase tutupan karang keras TNKJ (WCS, 2016)

Pada bulan Februari 2017 Indonesia *Coralreef Action Network (I-CAN)* menyatakan bahwa luas kerusakan terumbu karang di salah satu pulau TN Karimunjawa yaitu Pulau Cilik dari lima titik survey mencapai 423 meter persegi, yang disebabkan oleh kandasnya tongkang. Sementara dari Harian Tribune Jateng pada 8 April 2017 memuat kerusakan karang akibat terdamparnya 5 tongkang di perairan dangkal Pulau Cilik, Pulau Tengah dan Pulau Gosong (Takak) Tengah yang merupakan pulau-pulau kecil dalam wilayah TN Karimunjawa mencapai 1.200 – 1660 m<sup>2</sup>.

Bersandarnya kapal dan dilepasnya tongkang di perairan Karimunjawa lebih karena faktor "*force majeure*", yaitu cuaca buruk yang memaksa kapal-kapal menghentikan pelayaran dan kemudian berlindung di Karimunjawa. Walaupun alasan tersebut bisa dimaklumi, bagaimanapun juga terganggunya ekosistem terumbu karang memiliki dampak terhadap lingkungan seperti terganggunya fungsi ekologis karena terumbu karang merupakan habitat dan pendukung kehidupan biota laut, secara abiotik terdapat gangguan dalam fiksasi nitrogen (jasa biokimia), jasa informasi (pencatatan iklim) dan terganggunya jasa sosial budaya, karena terumbu karang merupakan penyedia nilai keindahan yang dapat dinikmati dalam berwisata (Moberg et al, 1999). Salah satu biota yang mempunyai habitat pada terumbu karang Karimunjawa adalah kima dan teripang.

Kima merupakan satwa yang dilindungi menurut PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Satwa ini di Taman Nasional Karimunjawa terdeteksi berada di Pulau Cemara Kecil, Pulau Cemara Besar, Pulau Geleang, Pulau Nyamuk, Pulau Katang, Pulau Krakal Kecil, Pulau Krakal Besar, Pulau Menyawakan dan Pulau Menjangan Besar. Tiga jenis kima ditemukan pada kawasan ini yaitu *Tridacna maxima*, *T. squamosa*, dan *T. crocea*. Hasil monitoring kima yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa, 2016 terlihat dalam gambar 2. Grafik tersebut menunjukkan kelimpahan kima pada 10 pulau Taman Nasional Karimunjawa, penurunan jumlah kima terjadi di beberapa stasiun pengamatan yaitu di Pulau Cemara Besar, Pulau Geleang dan Pulau Katang. Secara biotik penurunan populasi kima berdampak pada keberadaan biota itu sendiri, apabila ada pembiaran maka laju kepunahan terhadap kima juga akan meningkat karena biota ini hidup menempel pada karang, dan seumur hidup akan tinggal di titik pertama dia membangun rumahnya sehingga kima tidak dapat menghindar apabila terdapat pencongkelan terhadap dirinya untuk kepentingan kuliner. Secara ekologis, keberadaan kima merupakan pertanda bahwa kondisi perairan masih baik dan tidak terdapat bahan pencemar, sehingga apabila kima sudah tidak ada lagi maka tidak terdapat indikator alami untuk mengetahui kondisi perairan. Kandungan protein dalam kima seringkali menyebabkan biota ini menjadi hidangan istimewa (Kompasiana, 2014). Dengan

semakin menurunnya populasi, saat ini hampir tidak terdapat kuliner dari kima karena biota ini telah dilindungi oleh peraturan pemerintah.

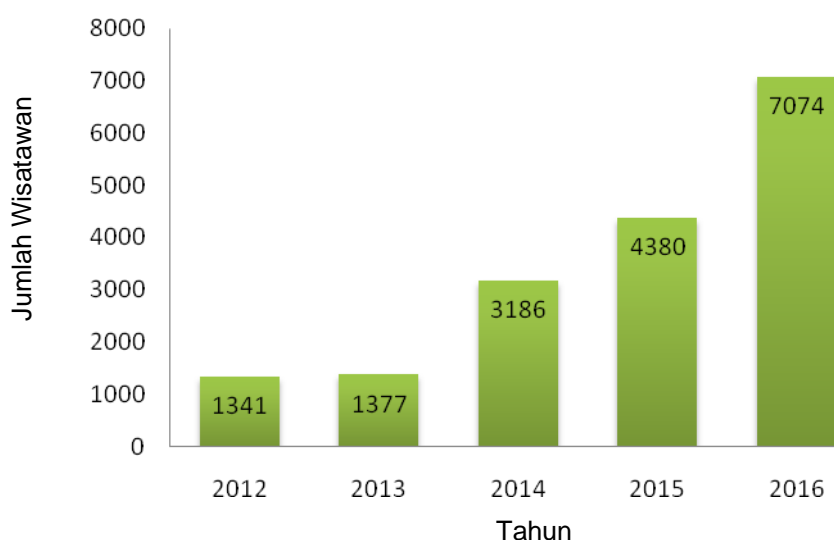


Gambar 2. Kelimpahan kima di 10 titik pengamatan (BTNKJ, 2016)

Selain kima, populasi teripang di beberapa stasiun pengamatan juga mengalami penurunan. Hasil monitoring teripang di stasiun pengamatan Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) II Karimunjawa tahun 2016, jumlah individu teripang ditemukan sebanyak 166 ekor. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 149 ekor bila dibandingkan dengan tahun 2012. Selain jumlah individu, terjadi pula penurunan jenis teripang yang ditemukan, yang semula 13 jenis di tahun 2012 menjadi 8 jenis di tahun 2016. Degradasi habitat dan daur hidup teripang yang spesifik menjadikan teripang sangat rentan oleh terjadinya tangkap lebih (*over exploitation*) mengakibatkan penurunan populasi. Berkurangnya populasi teripang berdampak secara ekologis terhadap lingkungan yaitu berkurangnya *deposit feeder* dan penyedia pangan bagi biota laut pemangsa disekitarnya. Adanya teripang juga merupakan indikator alami bahwa oksigen terlarut dalam perairan masih dalam kondisi cukup, dan apabila tidak ditemukan teripang dalam perairan maka tidak ada pula indikator alami untuk mengetahui kondisi perairan dan dapat dikatakan perairan mulai tercemar. Secara ekonomis teripang merupakan bahan makanan yang berprotein tinggi (82%) sehingga seringkali menjadi hidangan istimewa. Apabila populasinya terus menurun maka tidak terdapat lagi kuliner teripang dalam acara-acara khusus (Komala, 2015).



Selain masalah penurunan sumber daya alam hayati tersebut, sebagai kawasan pelestarian alam perairan yang merupakan tujuan wisata nasional Taman Nasional Karimunjawa dihadapkan pada ancaman *mass tourism*. Pengembangan pariwisata mengakibatkan makin tingginya jumlah pengunjung di Taman Nasional Karimunjawa yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan mulai tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada gambar 3. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang tercatat dalam tiket masuk *tracking mangrove*, sedangkan wisatawan yang langsung menikmati wisata bahari belum tercatat. Jumlah wisatawan yang terus meningkat memberi dampak yang positif dari segi kesejahteraan bagi warga Karimunjawa tetapi juga menimbulkan masalah baru seperti banyaknya sampah di pantai dan pelabuhan.



Gambar 3. Jumlah wisatawan yang berkunjung di TN Karimunjawa (Sumber: Balai Taman Nasional Karimunjawa, 2016)

Dari kegiatan bersih pantai yang dilakukan masyarakat bersama TNI/Polri, syahbandar, pengelola biro wisata, didapatkan sampah 12 ton dalam sehari (Koran Muria, 18/3/2016). Sampah berasal dari rumah tangga ataupun dari kegiatan wisata. Pengelolaan sampah secara tepat sangat diperlukan sehingga tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di Taman Nasional Karimunjawa. Masalah lain yang muncul adalah perubahan tata guna lahan akibat pembangunan penginapan dan hotel di pesisir pantai dan lereng gunung. Jumlah penginapan yang telah terbangun saat ini 78 buah sedangkan hotel 15 buah (Statistik Kecamatan

Karimunjava, 2015). Akibat banyaknya sampah di pantai menyebabkan terganggunya ekosistem penyu, penyu enggan bertelur di pantai yang kotor, dan apabila kondisi ini terus berlangsung maka akan terjadi penurunan populasi penyu. Dengan Pembangunan hotel dan tempat wisata di lereng perbukitan untuk menunjang kepentingan pariwisata, akibatnya pada 8 April 2017 terjadi banjir di Karimunjava (Metrotvnews, 2017). Banjir ini merupakan indikator penurunan kualitas lingkungan yang mengganggu aktivitas ekonomi.

Berbagai permasalahan baik itu penurunan sumber daya alam hayati maupun penurunan kualitas lingkungan memerlukan kebijakan pengelolaan yang tepat, sehingga program yang disusun mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Implementasi kebijakan sebagai salah satu proses penting dalam kebijakan publik perlu terus ditingkatkan. Berbagai hambatan yang sering dijumpai dalam implementasi kebijakan diantaranya adalah kepentingan kelompok sasaran yang belum terakomodir, sumberdaya finansial dan sumber daya manusia masih kurang, komunikasi yang lemah, penempatan pegawai/pejabat pada posisi yang kurang tepat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah (Arum Padmarani, 2011).

Implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjava perlu ditingkatkan demi terjaganya sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perlu dianalisis, supaya kegiatan konservasi dapat terlaksana dengan baik sehingga bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan akan diteliti berdasarkan penelitian yang telah ada dan disesuaikan menurut kondisi Taman Nasional Karimunjava. Faktor pertama yang perlu diteliti adalah sifat dan kemampuan program seperti yang telah dikemukakan oleh Chan, E. H. W dan Hou.J, (2015) sebagai karakteristik program. Program pengelolaan ini penting, karena program inilah yang akan menjelma sebagai kegiatan konservasi setiap tahun. Selanjutnya faktor yang kedua adalah sumber daya dan faktor yang ketiga adalah lingkungan kebijakan. Analisis terhadap ketiga faktor tersebut penting demi implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjava.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kondisi lingkungan di Taman Nasional Karimunjawa mengalami beberapa penurunan/kerusakan. Hal ini memberikan indikasi bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa dalam kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari (3P) kurang optimal. Implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan yang penting dari proses kebijakan publik perlu ditingkatkan dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa. Subarsono (2005) menerangkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya banyaknya aktor (unit organisasi) yang terlibat tetapi juga proses implementasi memuat berbagai variabel yang kompleks. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Karakteristik program sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlu dianalisis dalam implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.
2. Sumber daya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlu dianalisis dalam implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.
3. Lingkungan kebijakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlu dianalisis dalam implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.
4. Karakteristik program, sumber daya dan lingkungan kebijakan secara bersama-sama perlu dianalisis dalam implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh faktor karakteristik program terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa?
2. Apakah terdapat pengaruh faktor sumber daya terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa?

3. Apakah terdapat pengaruh faktor lingkungan kebijakan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa?
4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama faktor karakteristik program, sumber daya, dan lingkungan kebijakan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis pengaruh faktor karakteristik program terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.
2. Menganalisis pengaruh faktor sumber daya terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa
3. Menganalisis pengaruh faktor lingkungan kebijakan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.
4. Menganalisis pengaruh secara bersama-sama faktor karakteristik program, sumber daya dan lingkungan kebijakan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa, sehingga untuk kedepannya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi lainnya.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa belum pernah dilakukan, tetapi penelitian mengenai kebijakan pengelolaan kawasan konservasi telah banyak dilakukan sebelumnya seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Penelitian terdahulu tentang kebijakan pengelolaan kawasan konservasi

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan dan Metode	Hasil
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carolin Maier, Georg Winkel, Journal of Forest Policy and Economics, 2016</li> <li>- Implementing nature conservation through integrated forest management: A street-level bureaucracy perspective on the German public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui implementasi kebijakan konservasi terintegrasi utamanya dalam pengelolaan hutan</li> <li>- Metode Kualitatif dan kuantitatif, melalui interview 30 orang terhadap pelaksana kebijakan di tingkat lapangan, analisis SPSS.</li> </ul>	<p>Diperlukan kemauan dan komitmen dari penjaga hutan untuk mengimplementasikan konservasi alam terintegrasi.</p> <p>Pendanaan dan sumber daya manusia (personel) merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moses Muhumuza, Kevin Balkwill International Journal of Biodiversity, 2013</li> <li>- Factors Affecting the Success of Conserving Biodiversity in National Parks: A Review of Case Studies from Africa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan konservasi dalam taman nasional di Afrika.</li> <li>- Studi literatur mengenai konservasi keanekaragaman hayati</li> </ul>	<p>Kreasi dan pengelolaan taman nasional harus memperhatikan dimensi manusia (penduduk di sekitar taman nasional) selain keanekaragaman jenis dan habitat.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stuart J. Campbell, Tasrif Kartawijaya, Irfan Yulianto, Rian Prasetia, Julian Clifton, Journal Marine Policy, 2013</li> <li>- Co-Management Approach and Incentives Improve Management Effectiveness in the Karimunjawa National Park Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui apakah <i>economic incentive</i> dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam</li> <li>- Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan konservasi kawasan laut.</li> </ul>	<p>Dengan kebijakan dan peraturan MPA (<i>marine protected area</i>) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan dan Metode	Hasil
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arum Padmarani Swarna Aurajati, Tesis, Universitas Diponegoro, 2011</li> <li>- Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat (RSWP3K)</li> <li>- Menggunakan model studi kasus dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam terhadap para pihak yang berkepentingan dalam RSWP3K, RPJMD dan RPJPD.</li> </ul>	<p>RSWP3K belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi RPJMD. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan antara lain kepentingan kelompok sasaran yang belum terakomodir, letak RSWP3K kurang tepat, sumberdaya finansial dan SDM masih kurang, komunikasi yang lemah, penempatan pegawai/pejabat pada posisi yang kurang tepat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muh Yusuf, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2007</li> <li>- Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Kawasan Taman Nasional Karimunjawa Secara Berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan kesesuaian lahan, menyusun alternatif zonasi baru, strategi kebijakan</li> <li>- Data dikumpulkan dengan cara partisipatoris dengan pendekatan PCRA dan FGD dengan teknik wawancara serta survey lapangan. Analisis penentuan zonasi baru dilakukan secara spasial dengan metode SIG, Analisis Kebijakan dilakukan metode A'WOT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Didapatkan kesesuaian lahan untuk wisata dan budidaya.</li> <li>- 4 zona (inti, perikanan berkelanjutan, pemanfaatan dan rehabilitasi).</li> <li>- Pengelolaan partisipatif, penetapan zonasi dan keterpaduan stakeholder</li> </ul>

No	Peneliti/Tahun/Judul	Tujuan dan Metode	Hasil
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agus Prabowo, Tesis, Universitas Diponegoro, 2004</li> <li>- Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional Karimunjawa Paska Pelaksanaan UU No. 22/1999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat (BTNKJ) dan Pemda (Kab.Jepara)</li> <li>- Menggunakan metode diskriptif kualitatif, wawancara mendalam kepada <i>key informan</i> dari BTNKJ dan Pemda (Kab Jepara), FGD dan pengamatan langsung</li> </ul>	Mengubah sistem pengelolaan sentralistik menjadi lebih partisipatif.

Penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa berbeda dari penelitian terdahulu. Terdapat perbedaan implementasi kebijakan pengelolaan pada setiap kawasan konservasi begitu pula faktor yang mempengaruhi implementasinya. Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi dalam penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan analisa kualitatif sedangkan pada penelitian ini digunakan analisa kuantitatif.